



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA**

**NOMOR : 9 TAHUN 2010
TANGGAL : 6 OKTOBER 2010**

**TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA**

TAHUN ANGGARAN 2009

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2010 NOMOR 9 TAHUN 2010**

Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Bupati Tahun Anggaran 2009



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Perda Hal. 1

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 198).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

Dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	460,671,977,846.86		
b. Belanja	Rp	478,512,409,363.57		
b. Transfer	Rp	<u>530,809,806.00</u>		
Surplus/defisit			Rp	(18,371,241,322.71)
c. Pembiayaan				
- Penerimaan	Rp	43,391,557,712.94		
- Pengeluaran	Rp	<u>3,591,269,354.76</u>		
Pembiayaan Netto			Rp	39,800,288,358.18

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah		
Rp. 5.653.246.347,80 dengan rincian sebagai berikut :		
1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	455,018,731,499.06
2. realisasi	Rp	460,671,977,846.86
Selisih lebih	Rp	5,653,246,347.80
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah		
Rp. (18.316.340.097,43,-) dengan rincian sebagai berikut :		
1. anggaran belanja & transfer setelah perubahan	Rp	497,359,559,267.00
2. realisasi	Rp	479,043,219,169.57
Selisih (kurang)	Rp	(18,316,340,097.43)
c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah		
Rp. 23.697.350.883,23 dengan rincian sebagai berikut :		
1. surplus/defisit setelah perubahan	Rp	(42,340,827,767.94)
2. realisasi	Rp	(18,643,476,884.71)
Selisih lebih	Rp	23,697,350,883.23
d. selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan		
sejumlah (Rp 23.295.055,-) dengan rincian sebagai berikut :		
1. anggaran penerimaan pembiayaan	Rp	43,414,852,767.94
setelah perubahan	Rp	43,391,557,712.94
2. realisasi	Rp	(23,295,055.00)
Selisih (kurang)	Rp	(23,295,055.00)
e. selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan		
sejumlah Rp. 2.517.244.354,76 dengan rincian sebagai berikut :		
1. anggaran pengeluaran pembiayaan		1,074,025,000.00
setelah perubahan		3,591,269,354.76
2. realisasi		2,517,244,354.76
Selisih lebih		2,517,244,354.76

f. selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah
Rp. 2.540.539.409,76 dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	42,340,827,767.94
2. realisasi	<u>39,800,288,358.18</u>
Selisih lebih	(2,540,539,409.76)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31
Desember 2009 sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp. 1.171.371.877.677,42
b. jumlah kewajiban	Rp. 191.224.165,00
c. jumlah ekuitas dana	Rp. 1.140.282.204.384,42

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2009
sebagai berikut :

a/ arus kas dari aktivitas operasi :	Rp. 75.134.714.050,49
b. arus kas dari aktivitas investasi aset : non keuangan	Rp. (93.505.955.373,20)
c. arus kas dari aktivitas pembiayaan :	Rp. 4.062.919.018,47
d. arus kas dari aktivitas nonanggaran :	Rp. (2.280.088.502,00)
e. saldo kas akhir per 31 Desember 2009:	Rp. 21.620.271.200,47

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf d Tahun Anggaran 2009 memuat informasi baik secara
kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini,
terdiri dari :

- a. lampiran I : laporan realisasi anggaran
- lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
- lampiran I.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- lampiran I.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- lampiran I.5 : daftar piutang daerah;
- lampiran I.6 : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- lampiran I.7 : daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
- lampiran I.8 : daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya;
- lampiran I.9 : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- lampiran I.10 : daftar dana cadangan daerah; dan
- lampiran I.11 : daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. lampiran II : neraca
- c. lampiran III : laporan arus kas
- d. lampiran IV : catatan atas laporan keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. laporan kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini;
- b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 6 Oktober 2010

BUPATI LUWU UTARA


H. A. HERRY ISKANDAR

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 6 Oktober 2010

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA


H. SYAMSUL BACHRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010 NOMOR 9



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

ALAMAT : Jalan Simpursiang No. 26 MASAMBA ■ (0473) 21130

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2009
KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2009 perlu dilakukan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara.
 - b. bahwa hasil Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3826);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 7. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

ALAMAT : Jalan Simpursiang No. 26 MASAMBA ■ (0473) 21130

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2009
KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2009 perlu dilakukan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara.
 - b. bahwa hasil Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3826);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 7. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05);

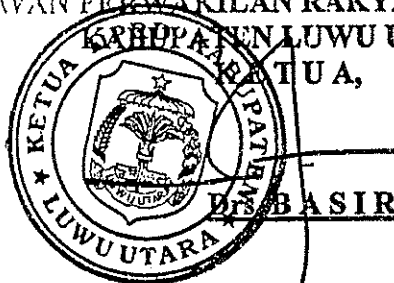
Perhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRD Kab. Luwu Utara tanggal 6 Oktober 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara atas Peretapan Ranperda Persetujuan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
- ESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
- EDUA : Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2009 sebagaimana lampiran keputusan ini.
- ETIGA : Untuk teknis pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.
- EEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 6 Oktober 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Penyampaian kepada Yth.:

1. Para Ketua Fraksi DPRD Kab. Luwu Utara

: Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Utara

Nomor : 19 Tahun 2010

Tanggal : 6 Oktober 2010

Tentang : Persetujuan atas Perlanggungawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Luwu Utara TA. 2006

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2006**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/(Kurang)	
			(Rp)	%
2	3	4	5	6
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	21,402,907,499.06	20,966,296,139.86	436,611,369.20	97.96
Pendapatan-Pajak Daerah	2,965,082,000.00	3,390,326,214.00	(425,244,214.00)	114.34
Pendapatan-Retribusi Daerah	9,744,192,000.00	10,285,000,973.00	(540,847,973.00)	105.55
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	493,270,000.00	493,270,911.74	(911.74)	100.00
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8,200,363,499.06	6,797,659,041.12	1,402,704,457.94	82.89
PENDAPATAN TRANSFER	432,610,662,000.00	438,167,834,963.00	(5,527,172,863.00)	101.28
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	409,780,126,000.00	407,846,269,354.00	1,933,856,646.00	99.63
Dana Bagi Hasil Pajak	33,180,974,000.00	32,274,783,008.00	906,210,192.00	97.27
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1,989,991,000.00	969,770,546.00	1,020,220,454.00	48.73
Dana Alokasi Umum	325,503,160,000.00	325,495,735,000.00	7,425,000.00	100.00
Dana Alokasi Khusus	49,106,000,000.00	49,106,000,000.00	-	100.00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	3,943,482,000.00	11,218,932,000.00	(7,275,450,000.00)	284.49
Dana Otonomi Khusus				
Dana Penyesuaian	3,943,482,000.00	11,218,932,000.00	(7,275,450,000.00)	284.49
Transfer Pemerintah Provinsi	18,917,055,000.00	19,102,633,509.00	(185,573,509.00)	100.98
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	9,329,111,000.00	9,397,300,785.00	(68,269,785.00)	100.73
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	9,587,944,000.00	9,705,252,724.00	(117,308,724.00)	101.22
LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH	975,162,000.00	1,537,846,844.00	(562,684,844.00)	167.70
Pendapatan Hibah	474,660,000.00	562,302,883.00	(87,670,883.00)	118.47
Pendapatan Dana Darurat				
Pendapatan Lainnya	500,500,000.00	975,513,961.00	(475,013,961.00)	194.91
JUMLAH PENDAPATAN	455,012,731,499.06	460,671,977,846.86	(5,663,246,347.80)	101.24
BELANJA				
BELANJA OPERASI	396,626,338,733.59	384,690,427,390.37	12,935,910,863.22	96.97
Belanja Pegawai	220,588,269,700.00	215,554,269,897.00	5,033,999,803.00	97.72
Belanja Barang	125,173,152,865.69	118,652,343,785.37	6,520,809,080.32	94.79
Belanja Bunga				
Belanja Subsidi				
Belanja Hibah	23,836,558,630.00	23,706,488,700.00	130,070,150.00	99.45
Belanja Bantuan Sosial	3,171,723,938.00	2,271,174,300.00	900,549,168.00	71.61
Belanja Bantuan Keuangan	23,856,632,800.00	23,506,150,208.00	350,482,662.00	98.53
BELANJA MODAL	99,151,939,113.31	94,669,756,973.20	4,482,182,140.11	95.48
Belanja Tanah	4,462,448,075.00	4,459,449,322.16	2,998,752.85	99.93
Belanja Peralatan dan Mesin	19,961,431,530.00	19,057,157,962.00	904,273,568.00	95.47
Belanja Gedung dan Bangunan	20,191,284,033.49	18,898,133,384.59	1,303,150,678.90	93.55
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	54,030,555,424.81	51,767,657,554.45	2,262,897,870.36	95.81
Belanja Aset Tetap Lainnya	506,220,000.00	497,359,750.00	8,861,250.00	98.25
Belanja Aset Lainnya				
BELANJA TIDAK TERDUGA	1,000,000,000.00	152,225,000.00	847,775,000.00	15.22
Belanja Tidak Terdugu	1,000,000,000.00	152,225,000.00	847,775,000.00	15.22
Jumlah Belanja	496,778,277,367.00	478,512,409,763.57	18,265,867,603.43	96.32

: Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Utara

Nomor : 19 Tahun 2010

Tanggal : 6 Oktober 2010

Tentang : Persetujuan atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Luwu Utara TA. 2006

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2009

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/(Kurang)	
			(Rp)	%
2	3	4	5	6
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	21,402,907,499.06	20,366,296,139.86	436,611,369.20	97.96
Pendapatan-Pajak Daerah	2,065,082,000.00	3,390,326,214.00	(425,244,214.00)	114.34
Pendapatan-Retribusi Daerah	1,744,192,000.00	10,285,003,973.00	(540,847,973.00)	105.55
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	493,270,000.00	493,270,911.74	(911.74)	100.00
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8,100,363,499.06	6,797,659,041.12	1,402,704,457.94	82.89
PENDAPATAN TRANSFER	432,640,662,000.00	438,167,834,863.00	(5,527,172,863.00)	101.28
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	409,780,125,000.00	407,846,269,354.00	1,933,855,646.00	99.53
Dana Bagi Hasil Pajak	33,180,974,000.00	32,274,763,808.00	906,210,192.00	97.27
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1,989,991,000.00	969,770,546.00	1,020,220,454.00	48.73
Dana Alokasi Umum	325,503,160,000.00	325,495,735,000.00	7,425,000.00	100.00
Dana Alokasi Khusus	49,106,000,000.00	49,106,000,000.00	-	100.00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	3,943,482,000.00	11,218,932,300.00	(7,275,450,000.00)	284.49
Dana Otonomi Khusus				
Dana Penyesuaian	3,943,482,000.00	11,218,932,300.00	(7,275,450,000.00)	284.49
Transfer Pemerintah Provinsi	18,917,055,000.00	19,102,633,509.00	(185,573,509.00)	100.98
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	9,329,111,000.00	9,397,310,785.00	(68,269,785.00)	100.73
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	9,587,944,000.00	9,705,252,724.00	(117,308,724.00)	101.22
LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH	975,162,000.00	1,537,846,844.00	(562,684,844.00)	157.70
Pendapatan Hibah	474,660,000.00	562,332,883.00	(87,670,883.00)	118.47
Pendapatan Dana Darurat				
Pendapatan Lainnya	500,500,000.00	975,513,961.00	(475,013,961.00)	194.91
JUMLAH PENDAPATAN	455,018,731,499.06	460,671,977,046.86	(5,653,245,547.80)	101.24
BELANJA				
BELANJA OPERASI	396,626,338,253.05	384,690,427,390.37	12,935,910,862.68	96.97
Belanja Pegawai	220,588,269,700.00	215,554,269,897.00	5,033,999,803.00	97.72
Belanja Barang	125,173,152,065.69	118,652,343,785.37	6,520,809,080.32	94.79
Belanja Bunga				
Belanja Subsidi				
Belanja Hibah	23,636,558,630.00	23,706,488,700.00	130,070,150.00	99.45
Belanja Bantuan Sosial	3,171,723,938.00	2,271,174,800.00	900,549,168.00	71.61
Belanja Bantuan Keuangan	23,856,632,800.00	23,506,150,208.00	350,482,662.00	98.53
BELANJA MODAL	99,161,939,113.31	64,669,756,073.20	4,482,182,140.11	65.48
Belanja Tanah	4,462,448,075.01	4,459,449,322.16	2,998,752.85	99.93
Belanja Peralatan dan Mesin	19,961,431,530.00	19,057,157,962.00	904,273,588.00	95.47
Belanja Gedung dan Bangunan	20,101,204,033.49	18,888,133,394.59	1,303,150,678.90	93.55
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	54,030,555,424.81	51,767,657,554.45	2,262,897,870.36	95.81
Belanja Aset Tetap Lainnya	505,220,000.00	497,353,750.00	8,851,250.00	98.25
Belanja Aset Lainnya				
BELANJA TIDAK TERDUGA	1,000,000,000.00	152,225,000.00	1,777,500.00	15.22
Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00	152,225,000.00	1,777,500.00	15.22
Jumlah Belanja	496,778,277,367.00	470,512,409,163.57	18,260,868,003.43	94.72

TRANSFER				
TRANSFER SAGI HASIL KE DESA	581,281,900.00	530,809,806.00	50,472,094.00	91.32
1 Bagi Hasil Pajak	347,008,200.00	335,231,428.00	11,746,772.00	96.61
2 Bagi Hasil Retribusi	234,273,700.00	195,548,378.00	38,725,322.00	83.47
3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				
Jumlah Transfer	581,281,900.00	530,809,806.00	50,472,094.00	91.32
JULAH BELANJA DAN TRANSFER				
	497,359,559,267.00	479,043,219,169.67	18,316,340,097.43	98.32
Surplus / (Defisit)	(42,340,827,767.94)	(18,371,241,322.71)	23,969,586,445.23	43.39
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Sis PA)	43,025,349,767.94	43,025,349,767.94	-	100.00
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
Penerimaan Piutang PFK	-	-	-	-
Penerimaan Dana Bergulir Bagi Kelompok Usaha UEP	-	-	-	-
Penerimaan Dana Bergulir Ketrans. Naker Instusional	-	-	-	-
Penerimaan Dana Bergulir Pengemb. Industri Kecil	389,503,000.00	74,875,070.00	314,627,930.00	19.22
Penerimaan Piutang TGR	-	291,332,875.00	(291,332,875.00)	-
Jumlah	43,414,852,767.94	43,391,667,712.94	23,295,055.00	99.35
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	-
Pembayaran Piutang Utang	74,025,000.00	74,025,000.00	-	100.00
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
Pembayaran Utang PFK	-	-	-	-
Pembayaran Dana Bergulir Modal Kerja	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	100.00
Pengeluaran Pemberian Pinjaman Daerah - Lain - Lain	-	2,517,244,354.76	(2,517,244,354.76)	-
Pembayaran Dana Bergulir Industri Kecil	-	-	-	-
Jumlah	1,074,025,000.00	3,591,269,354.76	(2,517,244,354.76)	334.37
Pebiayaan Netto	42,340,827,767.94	39,800,286,358.18	2,540,539,409.76	94.00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	21,429,647,036.47	(21,429,647,036.47)	-





PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 – Telepon 453050
MAKASSAR 90231

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 2334/X/TAHUN 2010

T E N T A N G

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN
2009 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Thn 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN

menetapkan :

SATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut :

I. PENDAPATAN :

- 1 Rasio realisasi PAD dan dana perimbangan terhadap realisasi Pendapatan Daerah sbb :
 - a. Realisasi PAD sebesar Rp. 20.985.393.452,86 terhadap realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 460.664.253.198,86 atau 4.56 %
 - b. Rasio realisasi dana perimbangan sebesar Rp. 407.846.269.354,- terhadap realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 460.664.253.198,86 atau 88.54%.

Selanjutnya rasio kemandirian daerah yaitu dengan membandingkan antara PAD dengan Dana Perimbangan ditambah Pinjaman Daerah yaitu : Rp.20.985.393.452,86 : (407.846.269.354,- atau 5.15 %.

Hal ini menunjukkan bahwa ketegantungan pada Dana Perimbangan masih sangat tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, disarankan agar senantiasa meningkatkan Pendapatan Daerah khususnya jenis-jenis pendapatan kelompok PAD dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi daerah yang dimiliki, melalui berbagai program peningkatan PAD yang bersifat strategis dengan tetap mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Pos Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Bantuan Keuangan dari Provinsi SulSel dianggarkan sebesar Rp. 9.586.018.000,- namun terealisasi sebesar Rp. 9.702.087.200,-. Berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1252/IV/Tahun 2009 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis dianggarkan sebesar Rp. 7.156.972.900,- dan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 1251/IV/Tahun 2009 tentang Alokasi Anggaran bantuan Pelayanan Kesehatan Gratis adalah sebesar Rp. 1.533.257.200,- sehingga jumlah pagu Pendidikan Gratis dan Kesehatan Gratis hanya sebesar Rp.8.690.230.000,-.

Rincian atas sumber sumber penerimaan Bantuan Keuangan belum dicantumkan dengan jelas, sehingga tidak memberikan sajian data yang akurat terhadap capaian dan pelampauan realisasi dari target yang dianggarkan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, supaya menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya, dan dirinci mulai Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi dan dianggarkan dalam APBD.

3. Belum mencantumkan dasar hukum penganggaran/ pungutan pendapatan pada kolom penjelasan buku Rancangan Peraturan Bupati. Hal ini belum sesuai dengan maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007. Sehubungan dengan hal itu, supaya diisi dengan :
 - a. Dasar hukum penganggaran/pungutan untuk setiap obyek penerimaan, berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Daerah.
 - b. Dasar penentuan jumlah pendapatan/ penerimaan yang direalisasikan dengan menguraikan jumlah, seperti kuantitas unit, orang, rumah tangga, frekwensi pemakaian/penggunaan, waktu, luas, bobot, atau volume dan ukuran lainnya yang digunakan dengan perkalian tarif pungutan atau harga/nilai satuan lainnya. Hal ini belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Sehubungan dengan hal tersebut supaya dilengkapi sebagaimana mestinya.
4. Terdapat SKPD yang merealisasikan pendapatan namun tidak dianggarkan seperti yang terdapat pada :
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah A.Djernma Masamba, pendapatan pembayaran denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan terealisasi sebesar Rp. 27.389.346,-
 - b. Dinas Pekerjaan Umum, pendapatan Retribusi izin Gangguan/ keramaian terealisasi sebesar Rp. 2.473.000,-
 - c. Dinas Pertanian, pada jenis belanja Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar Rp. 120.050.000,-
 - d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan terealisasi sebesar Rp. 3.282.125,-

Hal tersebut tidak sesuai maksud Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, yang menegaskan bahwa seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD. Sehubungan dengan hal tersebut agar dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan dan menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran tahun anggaran berikutnya.

II. BELANJA :

1. Belum mengisi kolom penjelasan pada buku Rancangan Peraturan Daerah dengan dasar hukum, lokasi kegiatan yang dilaksanakan. Hal tersebut belum sesuai maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman/ pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Sehubungan dengan hal tersebut, supaya diisi dengan penjelasan yang menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Belanja Tidak langsung

Setiap Rincian Obyek Belanja tidak langsung supaya diberi penjelasan mengenai dasar hukum anggaran/ realisasi dari sasaran yang diperuntukkan dengan menguraikan dasar perhitungan seperti jumlah orang, jumlah barang/ jasa, kuantitas unit, kuantitas waktu/ jam/ hari/ bulan/ tahun, ukuran berat, ukuran luas atau satuan ukuran lainnya yang digunakan dengan perkalian harga satuan/tarif, atau tingkat suku bunga, dan nilai kurs.

- b. Belanja langsung

Setiap kegiatan, supaya mencantumkan penjelasan pada kolom uraian sebagai berikut:

- Lokasi kegiatan, diisi dengan nama lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan
- Sumber dana, diisi dengan jenis sumber dana antara lain; PAD, Bagi Hasil, DAU, DAK, Hibah, Dana Darurat atau Jenis Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, Dana Cadangan dan Pinjaman Daerah, yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan
- Setiap jumlah Rincian Obyek Belanja Langsung supaya mencantumkan penjelasan atau keterangan yang memadai mengenai realisasi sasaran penggunaan.

2. Pada Beberapa SKPD terdapat penganggaran belanja, yang realisasinya jauh dibawah Pagu Anggaran yang telah ditetapkan, bahkan tidak ada realisasi sebagai berikut :

- a. Dinas Kesehatan pada kegiatan :

- Penyediaan Bahan, Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan terealisasi sebesar Rp. 3.989.000,- dari yang dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- atau (39,89%)
- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor terealisasi sebesar Rp. 7.500.000,- dari yang dianggarkan sebesar Rp. 17.500.000,- atau (42,86%)
- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana, terealisasi sebesar Rp. 67.202.000,- dari yang dianggarkan sebesar Rp. 168.177.500,- atau (39,96%)

- b. Rumah Sakit Umum Daerah A Djemma Masamba, pada kegiatan Rehabilitasi bangunan rumah sakit terealisasi sebesar Rp. 104.193.200,- dari yang dianggarkan sebesar Rp. 300.144.000,- (34,71%)
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, pada kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah terealisasi sebesar Rp. 3.900.000,- dari yang dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- atau (39 %)
- d. Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan, pada kegiatan Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling terealisasi sebesar Rp. 431.266.300,- dari yang dianggarkan sebesar Rp. 887.479.900,- atau (48,59%)
- e. Kantor Latihan Kerja, pada kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan terealisasi sebesar Rp. 5.625.000,- dari yang dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,- atau (27,50 %)
- f. Sekretariat Daerah pada kegiatan :
- Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal terealisasi sebesar Rp. 4.970.000,- dari yang dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- atau (3,31%)
 - Monitirong dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah, terealisasi sebesar Rp. 54.033.500,- dari yang dianggarkan sebesar Rp. 115.000.000,- atau (46,99%)
- g. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah pada kegiatan :
- Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah terealisasi sebesar Rp. 213.050.000,- dari yang dianggarkan sebesar Rp. 643.740.150,- atau (42,32%)
 - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Aset Barang Daerah, pada jenis belanja biaya rental kendaraan dinas tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp. 7.500.000,-
- h. Satuan Polisi Pamong Praja pada kegiatan :
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000,-
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan terealisasi sebesar Rp. 34.350.000,- dari yang dianggarkan sebesar Rp. 99.500.000,- atau (34,52%)
- g. Pemerintah Kelurahan Marobo, rincian obyek belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja terealisasi sebesar Rp. 17.850.000,- dari yang dianggarkan sebesar Rp. 51.600.000,- atau (34,59%)
- h. Pemerintah Kelurahan Salassa, rincian obyek belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban Kerja terealisasi sebesar Rp. 26.400.000,- dari yang dianggarkan sebesar Rp. 51.600.000,- atau (51,16%)

- i. Dinas Pertanian, kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan pada jenis belanja :
- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000,-
 - Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp. 306.000.000,-
 - Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan irigasi terealisasi sebesar Rp. 114.308.967,36 dari yang dianggarkan sebesar Rp. 818.550.000,- atau (13,96%)
- j. Dinas Kehutanan dan Perkebunan :
- Tata Batas dan Survey Potensi untuk Izin Pinjam pakai Kawasan Hutan, terealisasi sebesar Rp. 21.494.000,- dari yang dianggarkan sebesar Rp. 795.158.000,- atau (2,70 %)
 - Lanjutan Pengurusan Izin Penggunaan Kawasan Hutan terealisasi sebesar Rp. 19.550.000,- dari yang dianggarkan sebesar Rp. 70.138.000,- atau (27,87 %)

Hal tersebut mencerminkan pengelolaan anggaran yang belum cermat, baik dalam penyusunan perencanaan maupun dalam pelaksanaan anggaran, sesuai maksud Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, yang menegaskan bahwa Pengelolaan Anggaran/Keuangan Daerah yang berdasarkan asas efisiensi, ekonomis dan efektifitas dapat terpenuhi apabila pencapaian hasil program dan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, disarankan agar Program/Kegiatan yang direncanakan, disusun serealistis mungkin dengan meningkatkan pengendalian dalam pelaksanaannya.

III. PEMBIAYAAN :

1. Pada Pembiayaan Daerah belum mencantumkan penjelasan mengenai dasar pelaksanaan dari setiap rincian obyek Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Lampiran E.XXVIII (Penjabaran laporan realisasi anggaran), bahwa Setiap Obyek Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah agar mencantumkan dasar hukum berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, yang dilengkapi Penjelasan Nomor, dan Tahun, perjanjian/ Berita Acara atau Dokumen lain yang jadikan dasar pelaksanaan penerimaan/ pengeluaran pembiayaan. Sehubungan dengan hal tersebut, agar disempurnakan sebagaimana mestinya.

IV. NERACA, LRA, LAPORAN ARUS KAS DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Nilai Asset Tetap yang tercantum pada Neraca 2008 dan Neraca 2009, baik rincian maupun nilai akumulasinya tidak sesuai dengan yang tercantum pada Lampiran 1.7.
2. Nilai Konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum pada Neraca 2008 dan Neraca 2009 menunjukkan tidak adanya penyelesaian terhadap konstruksi yang belum dirampungkan pada TA 2008, hal ini berbeda dengan nilai yang tercantum pada lampiran 1.7
3. Nilai Asset Lainnya pada Neraca 2008 dan Neraca 2009, baik rincian maupun nilai akumulasinya tidak sesuai dengan yang tercantum pada Lampiran 1.8

V. LAIN-LAIN :

1. Belum dicantumkan Format Lampiran EXXVII (Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD) dan Format lampiran EXXVIII (Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD). Sehubungan dengan hal tersebut supaya dilampirkan.
2. Terdapat beberapa lampiran pada Perda yang tidak sesuai dengan Format yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yaitu :
 - a. Lampiran 1.1 Perda (Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD tidak sesuai Format E.XXVII point c
 - b. Lampiran 1.2 Perda (Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan tidak sesuai Format E.XXVII point d
 - c. Lampiran 1.3 Perda (Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan) tidak sesuai Format EXXVII point e
 - d. Lampiran 1.6 Perda (Daftar Piutang Daerah) tidak sesuai Format EXXVII point g
 - e. Lampiran 1.7 Perda (Daftar penyertaan modal (Investasi daerah) tidak sesuai format EXXVII point h
 - f. Lampiran 1.8 Perda (Daftar realisasi pemerintahan dan pengurangan aset tetap daerah) tidak sesuai format EXXVII point i
 - g. Lampiran 1.9 Perda (Daftar realisasi pemerintahan dan pengurangan aset lainnya) tidak sesuai format EXXVII point j

Sehubungan dengan hal tersebut agar disesuaikan sebagaimana mestinya.

3. Lampiran I.4 Perda (Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemda), Lampiran I.5 Perda (Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan) tidak terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut agar dilengkapi sebagaimana mestinya.

KEDUA : Bupati bersama DPRD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti keputusan ini dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 menjadi Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar

Pada Tanggal : 4 - 10 - 2010

An. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
SEKRETARIS WILAYAH DAERAH,

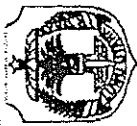
H. A. MUALLIM, SH, M.Si

Pangkat : Pembina Utama

NIP. : 19531223 197802 1 002

T e m b u s a n :

1. Menteri Dalam Negeri RI, sebagai laporan di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
3. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI di Makassar;
4. Inspektur Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2009

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (%)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	PENDAPATAN	455.018.731.499,06	460.671.977.846,86	5.653.246.347,80	101,24
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	21.402.907.499,06	20.966.296.139,86	(436.611.359,20)	97,96
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	2.965.082.000,00	3.390.326.214,00	425.244.214,00	114,34
1.1.1.1	Pendapatan Retribusi Daerah	9.744.192.000,00	10.285.039.973,00	540.847.973,00	105,55
1.1.1.2	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	493.270.000,00	493.270.911,74	911,74	100,00
1.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.200.363.499,06	6.797.559.041,12	(1.402.704.457,94)	82,89
1.1.1.4					
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	432.640.662.000,00	438.167.834.863,00	5.527.172.863,00	101,28
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	409.780.125.000,00	407.846.269.354,00	(1.933.855.646,00)	99,53
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	33.180.974.000,00	32.274.763.808,00	(906.210.192,00)	97,27
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1.989.991.000,00	969.770.546,00	(1.020.220.454,00)	48,73
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum	325.503.160.000,00	325.495.735.000,00	(7.425.000,00)	100,00
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus	49.106.000.000,00	49.106.000.000,00	0,00	100,00
1.2.1.1.4	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	3.943.482.000,00	11.218.932.000,00	7.275.450.000,00	284,49
1.2.2	Dana Penyesuaian	3.943.482.000,00	11.218.932.000,00	7.275.450.000,00	284,49
1.2.2.1	Transfer Pemerintah Provinsi	18.917.055.000,00	19.102.633.509,00	185.578.509,00	100,98
1.2.2.2	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	9.329.111.000,00	9.397.380.785,00	68.269.785,00	100,73
1.2.2.3	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	9.587.944.000,00	9.705.252.724,00	117.308.724,00	101,22
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	975.162.000,00	1.537.846.844,00	562.684.844,00	157,70
1.3.1	Pendapatan Hibah	474.662.000,00	562.332.883,00	87.670.883,00	118,47
1.3.1.1	Sumbangan Pihak III	500.500.000,00	975.513.961,00	475.013.961,00	194,91
1.3.1.6		497.359.559.267,00	479.043.219.169,57	(18.316.340.097,43)	96,32
2	BELANJA	396.626.338.253,69	383.690.427.390,37	(12.935.910.863,32)	96,74
2.1	BELANJA OPERASI	220.588.269.700,00	215.554.269.897,00	(5.033.999.803,00)	97,72
2.1.1	Belanja Pegawai	125.173.152.865,69	118.652.343.785,37	(6.520.809.080,32)	94,79
2.1.1.1	Belanja Barang	23.836.558.850,00	23.706.488.700,00	(130.070.150,00)	99,45
2.1.1.2	Belanja Hibah	3.171.723.968,00	2.271.174.800,00	(900.549.168,00)	71,61
2.1.1.5	Belanja Bantuan Sosial	23.856.632.870,00	23.506.150.208,00	(350.482.662,00)	98,53
2.1.1.6	Belanja Bantuan Keuangan				
2.1.1.7					

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.2	BELANJA MODAL	99.151.939.113,31	94.669.756.973,20	(4.482.182.140,11)	95,48
2.2.1	Belanja Tanah	4.462.448.075,01	4.459.449.322,16	(2.998.752,85)	99,93
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	19.958.931.550,00	19.057.157.962,00	(901.773.588,00)	95,48
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	20.193.784.063,49	18.888.133.384,59	(1.305.650.678,90)	93,53
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	54.030.555.424,81	51.767.657.554,45	(2.262.897.870,36)	95,81
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	506.220.000,00	497.358.750,00	(8.861.250,00)	98,25
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	1.000.000.000,00	152.225.000,00	(847.775.000,00)	15,22
2.3.1	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	152.225.000,00	(847.775.000,00)	15,22
2.4	TRANSFER	581.281.900,00	530.809.806,00	(50.472.094,00)	91,32
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	581.281.900,00	530.809.806,00	(50.472.094,00)	91,32
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	347.008.200,00	335.261.428,00	(11.746.772,00)	96,61
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	234.273.700,00	195.548.378,00	(38.725.322,00)	83,47
	SURPLUS / (DEFISIT)	(42.340.827.767,94)	(18.371.241.322,71)	23.969.586.445,23	43,39
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH	43.414.852.767,94	43.391.557.712,94	(23.295.055,00)	99,95
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	43.025.349.767,94	43.025.349.767,94	0,00	100,00
3.1.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	389.503.000,00	74.875.070,00	(314.627.930,00)	19,22
3.1.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	291.332.875,00	291.332.875,00	0,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH	1.074.025.000,00	3.591.269.354,76	2.517.244.354,76	334,37
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	74.025.000,00	74.025.000,00	0,00	100,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	2.517.244.354,76	2.517.244.354,76	0,00
3.2.5	Pemberian Pinjaman Dana Bergulir	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	42.340.827.767,94	39.800.288.358,18	(2.540.539.409,76)	94,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	21.429.047.035,47	21.429.047.035,47	0,00

Masamba, 6 Oktober 2010

BUPATI BUPATI



LUYUTYERRY ISKANDAR, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
 TAHUN ANGGARAN 2009

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
4	PENDAPATAN	455.018.731.499,06	460.671.977.846,86	5.653.246.347,80
4.1	Urusan Wajib Pendidikan	453.882.737.499,06	459.224.333.021,86	5.341.595.522,80
4.1.01	Dinas Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda	0,00	15.894.809,43	15.894.809,43
4.1.01.1.01.01		0,00	15.894.809,43	15.894.809,43
4.1.02	Kesehatan	6.701.770.000,00	7.269.833.002,00	568.063.002,00
4.1.02.1.02.01	Dinas Kesehatan	464.120.000,00	862.715.278,00	398.595.278,00
4.1.02.1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah A. Djemma Masamba	6.237.650.000,00	6.407.117.724,00	169.467.724,00
4.1.03	Pekerjaan Umum	1.105.500.000,00	1.337.807.042,43	232.307.042,43
4.1.03.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	1.105.500.000,00	1.337.807.042,43	232.307.042,43
4.1.07	Perhubungan	124.924.000,00	130.293.396,00	5.369.396,00
4.1.07.1.07.01	Dinas Perhubungan	124.924.000,00	130.293.396,00	5.369.396,00
4.1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil	685.455.000,00	389.672.500,00	(295.782.500,00)
4.1.10.1.10.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	685.455.000,00	389.672.500,00	(295.782.500,00)
4.1.13	Sosial	500.000,00	980.000,00	480.000,00
4.1.13.1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	500.000,00	980.000,00	480.000,00
4.1.14	Ketnagakerjaan	11.000.000,00	13.560.000,00	2.560.000,00
4.1.14.1.14.01	Kantor Lathhan Kerja	11.000.000,00	13.560.000,00	2.560.000,00
4.1.15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	153.950.000,00	154.725.000,00	775.000,00
4.1.15.1.15.01	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	153.950.000,00	154.725.000,00	775.000,00
4.1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	3.500.000,00	3.085.000,00	(415.000,00)
4.1.19.1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	3.500.000,00	3.085.000,00	(415.000,00)
4.1.20	Otoda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawalan, & Persandian	445.088.638.499,06	449.900.732.272,00	4.812.093.772,94
4.1.20.1.20.03	Sekretariat Daerah	215.700.000,00	44.675.000,00	(171.025.000,00)
4.1.20.1.20.06	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah	444.367.720.499,06	449.408.793.772,00	5.041.073.272,94
4.1.20.1.20.07	Badan Kepegawalan Daerah dan Diklat	16.000.000,00	22.175.000,00	6.175.000,00
4.1.20.1.20.09	Pemerintah Kecamatan Sabbang	81.435.000,00	70.957.000,00	(10.478.000,00)

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)
4.1.20.1.20.10	Pemerintah Kecamatan Baebunta	6.660.000,00	6.887.500,00	227.500,00
4.1.20.1.20.11	Pemerintah Kecamatan Limbong	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
4.1.20.1.20.12	Pemerintah Kecamatan Seko	1.720.000,00	1.700.000,00	(20.000,00)
4.1.20.1.20.13	Pemerintah Kecamatan Rampi	500.000,00	500.000,00	0,00
4.1.20.1.20.14	Pemerintah Kecamatan Malangke	4.420.000,00	5.210.000,00	790.000,00
4.1.20.1.20.15	Pemerintah Kecamatan Malangke Barat	10.669.000,00	10.494.500,00	(174.500,00)
4.1.20.1.20.16	Pemerintah Kecamatan Masamba	177.640.000,00	139.163.500,00	(38.476.500,00)
4.1.20.1.20.17	Pemerintah Kecamatan Mappedeceng	21.345.000,00	20.771.000,00	(574.000,00)
4.1.20.1.20.18	Pemerintah Kecamatan Bone-Bone	111.385.000,00	99.516.500,00	(11.868.500,00)
4.1.20.1.20.19	Pemerintah Kecamatan Sukamaju	72.094.000,00	68.538.500,00	(3.555.500,00)
4.1.20.1.20.20	Pemerintah Kelurahan Kappuna	0,00	0,00	0,00
4.1.20.1.20.21	Pemerintah Kelurahan Bone	0,00	0,00	0,00
4.1.25	Komunikasi dan Informatika	7.500.000,00	7.750.000,00	250.000,00
4.1.25.1.25.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata	7.500.000,00	7.750.000,00	250.000,00
4.2	Urusan Pilihan	1.135.994.000,00	1.447.644.825,00	311.650.825,00
4.2.01	Pertanian	112.375.000,00	230.343.000,00	117.968.000,00
4.2.01.2.01.01	Dinas Pertanian	112.375.000,00	230.343.000,00	117.968.000,00
4.2.02	Kehutanan	805.500.000,00	999.382.125,00	193.882.125,00
4.2.02.2.02.01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	805.500.000,00	999.382.125,00	193.882.125,00
4.2.03	Energi dan Sumberdaya Mineral	460.000,00	360.000,00	(100.000,00)
4.2.03.2.03.01	Dinas Pertambangan dan Energi	460.000,00	360.000,00	(100.000,00)
4.2.05	Kelautan dan Perikanan	217.659.000,00	217.559.700,00	(99.300,00)
4.2.05.2.05.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	217.659.000,00	217.559.700,00	(99.300,00)

NOMOR URUT	URUTAN	PERUBAHAN	
5	BELANJA	497.359.559.267,00	18.316.340.097,43
5.1	Urusan Wajib	457.071.462.733,64	15.420.560.993,36
5.1.01	Pendidikan	138.059.305.665,68	1.024.368.134,32
5.1.01.1.01.01	Dinas Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda	138.059.305.665,68	1.024.368.134,32
5.1.01.1.01.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	102.453.434.134,00	(408.322.866,00)
5.1.01.1.01.01.1.1	Belanja Pegawai	102.453.434.134,00	(408.322.866,00)
5.1.01.1.01.01.2	BELANJA LANGSUNG	35.605.871.531,68	(616.045.268,32)
5.1.01.1.01.01.2.1	Belanja Pegawai	7.893.073.150,00	(143.188.950,00)
5.1.01.1.01.01.2.1.1	Belanja Pegawai	19.200.405.720,00	(267.022.980,00)
5.1.01.1.01.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.512.392.661,68	(205.833.338,32)
5.1.01.1.01.01.2.3	Belanja Modal	71.513.848.200,00	(2.788.221.129,63)
5.1.02	Kesehatan	44.851.757.182,00	(2.460.194.818,00)
5.1.02.1.02.01	Dinas Kesehatan	14.484.542.180,00	(343.427.820,00)
5.1.02.1.02.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.484.542.180,00	(343.427.820,00)
5.1.02.1.02.01.1.1	Belanja Pegawai	30.367.215.002,00	(2.116.766.998,00)
5.1.02.1.02.01.2	BELANJA LANGSUNG	1.707.579.000,00	(158.221.000,00)
5.1.02.1.02.01.2.1	Belanja Pegawai	16.388.953.961,00	(843.485.539,00)
5.1.02.1.02.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.270.682.041,00	(1.115.060.459,00)
5.1.02.1.02.01.2.3	Belanja Modal	24.201.896.200,00	(328.026.311,63)
5.1.02.1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah A. Djemma Masamba	9.974.873.997,00	(43.641.003,00)
5.1.02.1.02.02.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.974.873.997,00	(43.641.003,00)
5.1.02.1.02.02.1.1	Belanja Pegawai	13.898.995.891,37	(284.385.308,63)
5.1.02.1.02.02.2	BELANJA LANGSUNG	671.985.000,00	(15.665.000,00)
5.1.02.1.02.02.2.1	Belanja Pegawai	10.690.863.465,37	(39.448.734,63)
5.1.02.1.02.02.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.536.147.426,00	(229.271.574,00)
5.1.02.1.02.02.2.3	Belanja Modal	69.353.228.637,00	(1.349.092.115,41)
5.1.03	Pekerjaan Umum	64.747.641.896,59	(1.330.392.112,41)
5.1.03.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	3.775.103.731,00	(64.976.269,00)
5.1.03.1.03.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.775.103.731,00	(64.976.269,00)
5.1.03.1.03.01.1.1	Belanja Pegawai	60.972.538.165,59	(1.265.415.843,41)
5.1.03.1.03.01.2	BELANJA LANGSUNG	785.950.000,00	(16.000.000,00)
5.1.03.1.03.01.2.1	Belanja Pegawai	2.551.427.461,69	(10.546.071,69)
5.1.03.1.03.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.884.576.547,31	(1.238.869.771,72)
5.1.03.1.03.01.2.3	Belanja Modal		

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.03.1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	120.000.000,00	119.213.500,00	(786.500,00)	99,34
5.1.03.1.06.01.2	BELANJA LANGSUNG	120.000.000,00	119.213.500,00	(786.500,00)	99,34
5.1.03.1.06.01.2.1	Belanja Pegawai	23.650.000,00	23.200.000,00	(450.000,00)	98,10
5.1.03.1.06.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	96.350.000,00	96.013.500,00	(336.500,00)	99,65
5.1.03.1.20.03	Sekretariat Daerah	807.960.868,00	796.769.500,00	(11.191.368,00)	98,61
5.1.03.1.20.03.2	BELANJA LANGSUNG	807.960.868,00	796.769.500,00	(11.191.368,00)	98,61
5.1.03.1.20.03.2.1	Belanja Pegawai	126.400.000,00	123.350.000,00	(3.050.000,00)	97,59
5.1.03.1.20.03.2.2	Belanja Barang dan Jasa	397.038.252,00	388.897.900,00	(8.140.352,00)	97,95
5.1.03.1.20.03.2.3	Belanja Modal	284.522.616,00	284.521.600,00	(1.016,00)	100,00
5.1.03.2.01.01	Dinas Pertanian	102.313.750,00	96.541.750,00	(5.772.000,00)	94,36
5.1.03.2.01.01.2	BELANJA LANGSUNG	102.313.750,00	96.541.750,00	(5.772.000,00)	94,36
5.1.03.2.01.01.2.3	Belanja Modal	102.313.750,00	96.541.750,00	(5.772.000,00)	94,36
5.1.03.2.05.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.244.920.010,00	2.243.969.875,00	(950.135,00)	99,96
5.1.03.2.05.01.2	BELANJA LANGSUNG	2.244.920.010,00	2.243.969.875,00	(950.135,00)	99,96
5.1.03.2.05.01.2.1	Belanja Pegawai	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	100,00
5.1.03.2.05.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.064.566.010,00	2.063.920.875,00	(645.135,00)	99,97
5.1.03.2.05.01.2.3	Belanja Modal	173.254.000,00	172.949.000,00	(305.000,00)	99,82
5.1.04	Perumahan	347.003.750,00	346.973.750,00	(30.000,00)	99,99
5.1.04.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	347.003.750,00	346.973.750,00	(30.000,00)	99,99
5.1.04.1.03.01.2	BELANJA LANGSUNG	347.003.750,00	346.973.750,00	(30.000,00)	99,99
5.1.04.1.03.01.2.3	Belanja Modal	347.003.750,00	346.973.750,00	(30.000,00)	99,99
5.1.05	Penataan Ruang	1.453.679.500,00	1.333.712.550,00	(119.966.950,00)	91,75
5.1.05.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	390.000.000,00	374.397.500,00	(15.602.500,00)	96,00
5.1.05.1.03.01.2	BELANJA LANGSUNG	390.000.000,00	374.397.500,00	(15.602.500,00)	96,00
5.1.05.1.03.01.2.1	Belanja Pegawai	84.550.000,00	69.760.000,00	(14.790.000,00)	82,51
5.1.05.1.03.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	305.450.000,00	304.637.500,00	(812.500,00)	99,73
5.1.05.1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.063.679.500,00	959.315.050,00	(104.364.450,00)	90,19
5.1.05.1.06.01.2	BELANJA LANGSUNG	1.063.679.500,00	959.315.050,00	(104.364.450,00)	90,19
5.1.05.1.06.01.2.1	Belanja Pegawai	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	100,00
5.1.05.1.06.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.045.979.500,00	941.615.050,00	(104.364.450,00)	90,02
5.1.06	Perencanaan Pembangunan	4.965.990.500,00	4.800.740.692,00	(165.249.808,00)	96,67
5.1.06.1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.370.315.500,00	4.209.661.842,00	(160.653.658,00)	96,32
5.1.06.1.06.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.444.595.000,00	1.387.608.092,00	(56.986.908,00)	96,06

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.06.1.06.01.1.1	Belanja Pegawai	1.444.595.000,00	1.387.608.092,00	(56.986.908,00)	96,06
5.1.06.1.06.01.2	BELANJA LANGSUNG	2.925.720.500,00	2.822.053.750,00	(103.666.750,00)	96,46
5.1.06.1.06.01.2.1	Belanja Pegawai	403.650.000,00	360.300.000,00	(43.350.000,00)	89,26
5.1.06.1.06.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.494.570.500,00	2.434.253.750,00	(60.316.750,00)	97,58
5.1.06.1.06.01.2.3	Belanja Modal	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	100,00
5.1.06.1.20.03	Sekretariat Daerah	595.675.000,00	591.078.850,00	(4.596.150,00)	99,23
5.1.06.1.20.03.2	BELANJA LANGSUNG	595.675.000,00	591.078.850,00	(4.596.150,00)	99,23
5.1.06.1.20.03.2.1	Belanja Pegawai	66.875.000,00	66.625.000,00	(250.000,00)	99,63
5.1.06.1.20.03.2.2	Belanja Barang dan Jasa	528.800.000,00	524.453.850,00	(4.346.150,00)	99,18
5.1.07	Perhubungan	5.092.323.000,00	5.020.236.374,00	(72.086.626,00)	98,58
5.1.07.1.07.01	Dinas Perhubungan	5.092.323.000,00	5.020.236.374,00	(72.086.626,00)	98,58
5.1.07.1.07.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.923.783.000,00	1.853.062.458,00	(70.720.542,00)	96,32
5.1.07.1.07.01.1.1	Belanja Pegawai	1.923.783.000,00	1.853.062.458,00	(70.720.542,00)	96,32
5.1.07.1.07.01.2	BELANJA LANGSUNG	3.168.540.000,00	3.167.173.916,00	(1.366.084,00)	99,96
5.1.07.1.07.01.2.1	Belanja Pegawai	266.220.000,00	265.957.500,00	(262.500,00)	99,90
5.1.07.1.07.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.890.235.000,00	1.889.310.916,00	(924.084,00)	99,95
5.1.07.1.07.01.2.3	Belanja Modal	1.012.085.000,00	1.011.905.500,00	(179.500,00)	99,98
5.1.08	Lingkungan Hidup	3.410.526.000,00	3.359.546.409,00	(50.979.591,00)	98,51
5.1.08.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	857.500.000,00	856.461.700,00	(1.038.300,00)	99,88
5.1.08.1.03.01.2	BELANJA LANGSUNG	857.500.000,00	856.461.700,00	(1.038.300,00)	99,88
5.1.08.1.03.01.2.1	Belanja Pegawai	87.980.000,00	87.980.000,00	0,00	100,00
5.1.08.1.03.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	622.020.000,00	620.981.700,00	(1.038.300,00)	99,83
5.1.08.1.03.01.2.3	Belanja Modal	147.500.000,00	147.500.000,00	0,00	100,00
5.1.08.1.08.01	Kantor Lingkungan Hidup	2.553.026.000,00	2.503.084.709,00	(49.941.291,00)	98,04
5.1.08.1.08.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	352.761.000,00	330.464.609,00	(22.296.391,00)	93,68
5.1.08.1.08.01.1.1	Belanja Pegawai	352.761.000,00	330.464.609,00	(22.296.391,00)	93,68
5.1.08.1.08.01.2	BELANJA LANGSUNG	2.200.265.000,00	2.172.620.100,00	(27.644.900,00)	98,74
5.1.08.1.08.01.2.1	Belanja Pegawai	105.595.000,00	101.475.000,00	(4.120.000,00)	96,10
5.1.08.1.08.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	725.980.000,00	716.473.400,00	(9.506.600,00)	98,69
5.1.08.1.08.01.2.3	Belanja Modal	1.368.690.000,00	1.354.671.700,00	(14.018.300,00)	98,98
5.1.09	Pertanahan	2.879.903.000,00	2.877.375.000,00	(2.528.000,00)	99,91
5.1.09.1.20.03	Sekretariat Daerah	2.879.903.000,00	2.877.375.000,00	(2.528.000,00)	99,91
5.1.09.1.20.03.2	BELANJA LANGSUNG	2.879.903.000,00	2.877.375.000,00	(2.528.000,00)	99,91
5.1.09.1.20.03.2.1	Belanja Pegawai	53.750.000,00	53.250.000,00	(500.000,00)	99,07

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.09.1.20.03.2.2	Belanja Barang dan Jasa	809.703.000,00	807.675.000,00	(2.028.000,00)	99,75
5.1.09.1.20.03.2.3	Belanja Modal	2.016.450.000,00	2.016.450.000,00	0,00	100,00
5.1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil	3.706.960.500,00	3.478.610.200,00	(228.350.300,00)	93,84
5.1.10.1.10.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.706.960.500,00	3.478.610.200,00	(228.350.300,00)	93,84
5.1.10.1.10.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.158.700.000,00	1.032.801.700,00	(125.898.300,00)	89,13
5.1.10.1.10.01.1.1	Belanja Pegawai	1.158.700.000,00	1.032.801.700,00	(125.898.300,00)	89,13
5.1.10.1.10.01.2	BELANJA LANGSUNG	2.548.260.500,00	2.445.808.500,00	(102.452.000,00)	95,98
5.1.10.1.10.01.2.1	Belanja Pegawai	473.450.000,00	466.400.000,00	(7.050.000,00)	98,51
5.1.10.1.10.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.858.203.000,00	1.763.733.500,00	(94.469.500,00)	94,92
5.1.10.1.10.01.2.3	Belanja Modal	216.607.500,00	215.675.000,00	(932.500,00)	99,57
5.1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.132.214.100,00	1.093.273.640,00	(38.940.460,00)	96,56
5.1.11.1.11.01	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	1.132.214.100,00	1.093.273.640,00	(38.940.460,00)	96,56
5.1.11.1.11.01.2	BELANJA LANGSUNG	1.132.214.100,00	1.093.273.640,00	(38.940.460,00)	96,56
5.1.11.1.11.01.2.1	Belanja Pegawai	203.600.000,00	201.950.000,00	(1.650.000,00)	99,19
5.1.11.1.11.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	679.846.100,00	664.543.240,00	(15.302.860,00)	97,75
5.1.11.1.11.01.2.3	Belanja Modal	248.768.000,00	226.780.400,00	(21.987.600,00)	91,16
5.1.12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	5.468.817.640,00	4.947.433.721,00	(521.383.919,00)	90,47
5.1.12.1.12.01	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	5.468.817.640,00	4.947.433.721,00	(521.383.919,00)	90,47
5.1.12.1.12.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.844.727.000,00	2.817.821.621,00	(26.905.379,00)	99,05
5.1.12.1.12.01.1.1	Belanja Pegawai	2.844.727.000,00	2.817.821.621,00	(26.905.379,00)	99,05
5.1.12.1.12.01.2	BELANJA LANGSUNG	2.624.090.640,00	2.129.612.100,00	(494.478.540,00)	81,16
5.1.12.1.12.01.2.1	Belanja Pegawai	857.370.000,00	841.010.800,00	(16.359.200,00)	98,09
5.1.12.1.12.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	879.240.740,00	857.335.000,00	(21.905.740,00)	97,51
5.1.12.1.12.01.2.3	Belanja Modal	887.479.900,00	431.266.300,00	(456.213.600,00)	48,59
5.1.13	Sosial	6.012.027.180,00	5.945.220.940,00	(66.806.240,00)	98,89
5.1.13.1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.012.027.180,00	5.945.220.940,00	(66.806.240,00)	98,89
5.1.13.1.13.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.943.551.000,00	2.893.871.961,00	(49.679.039,00)	98,31
5.1.13.1.13.01.1.1	Belanja Pegawai	2.943.551.000,00	2.893.871.961,00	(49.679.039,00)	98,31
5.1.13.1.13.01.2	BELANJA LANGSUNG	3.068.476.180,00	3.051.348.979,00	(17.127.201,00)	99,44
5.1.13.1.13.01.2.1	Belanja Pegawai	358.385.000,00	347.010.000,00	(11.375.000,00)	96,83
5.1.13.1.13.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.638.891.180,00	2.633.468.979,00	(5.422.201,00)	99,79
5.1.13.1.13.01.2.3	Belanja Modal	71.200.000,00	70.870.000,00	(330.000,00)	99,54
5.1.14	Ketengakerjaan	3.170.317.000,00	3.101.019.690,00	(69.297.310,00)	97,81
5.1.14.1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	420.173.000,00	418.406.000,00	(1.767.000,00)	99,58

KODOK URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.14.1.13.01.2	BELANJA LANGSUNG	420.173.000,00	418.406.000,00	(1.767.000,00)	99,58
5.1.14.1.13.01.2.1	Belanja Pegawai	72.575.000,00	72.575.000,00	0,00	100,00
5.1.14.1.13.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	346.098.000,00	344.331.000,00	(1.767.000,00)	99,49
5.1.14.1.13.01.2.3	Belanja Modal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
5.1.14.1.14.01	Kantor Latihan Kerja	2.750.144.000,00	2.682.613.690,00	(67.530.310,00)	97,54
5.1.14.1.14.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	661.144.000,00	642.695.935,00	(18.448.065,00)	97,21
5.1.14.1.14.01.1.1	Belanja Pegawai	661.144.000,00	642.695.935,00	(18.448.065,00)	97,21
5.1.14.1.14.01.2	BELANJA LANGSUNG	2.089.000.000,00	2.039.917.755,00	(49.082.245,00)	97,65
5.1.14.1.14.01.2.1	Belanja Pegawai	219.670.000,00	218.870.000,00	(800.000,00)	99,64
5.1.14.1.14.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.229.875.000,00	1.183.285.855,00	(46.589.145,00)	96,21
5.1.14.1.14.01.2.3	Belanja Modal	639.455.000,00	637.761.900,00	(1.693.100,00)	99,74
5.1.15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.560.112.750,00	2.367.273.711,00	(192.839.039,00)	92,47
5.1.15.1.15.01	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.410.112.750,00	2.362.303.711,00	(47.809.039,00)	98,02
5.1.15.1.15.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.603.799.000,00	1.565.592.711,00	(38.206.289,00)	97,62
5.1.15.1.15.01.1.1	Belanja Pegawai	1.603.799.000,00	1.565.592.711,00	(38.206.289,00)	97,62
5.1.15.1.15.01.2	BELANJA LANGSUNG	806.313.750,00	796.711.000,00	(9.602.750,00)	98,81
5.1.15.1.15.01.2.1	Belanja Pegawai	143.650.000,00	142.945.000,00	(705.000,00)	99,51
5.1.15.1.15.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	553.211.500,00	544.721.000,00	(8.490.500,00)	98,47
5.1.15.1.15.01.2.3	Belanja Modal	109.452.250,00	109.045.000,00	(407.250,00)	99,63
5.1.15.1.20.03	Sekretariat Daerah	150.000.000,00	4.970.000,00	(145.030.000,00)	3,31
5.1.15.1.20.03.2	BELANJA LANGSUNG	150.000.000,00	4.970.000,00	(145.030.000,00)	3,31
5.1.15.1.20.03.2.1	Belanja Pegawai	8.350.000,00	0,00	(8.350.000,00)	0,00
5.1.15.1.20.03.2.2	Belanja Barang dan Jasa	141.650.000,00	4.970.000,00	(136.680.000,00)	3,51
5.1.16	Penanaman Modal	260.000.000,00	255.779.500,00	(4.220.500,00)	98,38
5.1.16.1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	160.000.000,00	158.237.000,00	(1.763.000,00)	98,90
5.1.16.1.06.01.2	BELANJA LANGSUNG	160.000.000,00	158.237.000,00	(1.763.000,00)	98,90
5.1.16.1.06.01.2.1	Belanja Pegawai	13.050.000,00	13.050.000,00	0,00	100,00
5.1.16.1.06.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	146.950.000,00	145.187.000,00	(1.763.000,00)	98,80
5.1.16.1.20.03	Sekretariat Daerah	100.000.000,00	97.542.500,00	(2.457.500,00)	97,54
5.1.16.1.20.03.2	BELANJA LANGSUNG	100.000.000,00	97.542.500,00	(2.457.500,00)	97,54
5.1.16.1.20.03.2.1	Belanja Pegawai	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	100,00
5.1.16.1.20.03.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.650.000,00	89.192.500,00	(2.457.500,00)	97,32
5.1.17	Kebudayaan	106.550.000,00	106.310.000,00	(240.000,00)	99,77
5.1.17.1.25.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata	106.550.000,00	106.310.000,00	(240.000,00)	99,77

URUT	PERUBAHAN	REALISASI		
5.1.17.1.25.01.2	BELANJA LANGSUNG	106.550.000,00	106.310.000,00	99,77
5.1.17.1.25.01.2.1	Belanja Pegawai	29.100.000,00	29.100.000,00	100,00
5.1.17.1.25.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.450.000,00	77.210.000,00	99,69
5.1.18	Kepemudaan dan Olah Raga	283.516.000,00	282.566.000,00	99,66
5.1.18.1.01.01	Dinas Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda	283.516.000,00	282.566.000,00	99,66
5.1.18.1.01.01.2	BELANJA LANGSUNG	283.516.000,00	282.566.000,00	99,66
5.1.18.1.01.01.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
5.1.18.1.01.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	71.050.000,00	98,68
5.1.18.1.01.01.2.3	Belanja Modal	208.516.000,00	208.516.000,00	100,00
5.1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	3.307.033.500,00	3.174.051.996,00	95,98
5.1.19.1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	2.612.754.000,00	2.532.266.496,00	96,92
5.1.19.1.19.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.093.854.000,00	1.026.527.996,00	93,85
5.1.19.1.19.01.1.1	Belanja Pegawai	1.093.854.000,00	1.026.527.996,00	93,85
5.1.19.1.19.01.2	BELANJA LANGSUNG	1.518.900.000,00	1.505.738.500,00	99,13
5.1.19.1.19.01.2.1	Belanja Pegawai	279.930.000,00	273.420.000,00	97,67
5.1.19.1.19.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.172.970.000,00	1.169.718.500,00	99,72
5.1.19.1.19.01.2.3	Belanja Modal	66.000.000,00	62.600.000,00	94,85
5.1.19.1.20.08	Satuan Polisi Pamong Praja	694.279.500,00	641.785.500,00	92,44
5.1.19.1.20.08.2	BELANJA LANGSUNG	694.279.500,00	641.785.500,00	92,44
5.1.19.1.20.08.2.1	Belanja Pegawai	43.650.000,00	32.150.000,00	73,65
5.1.19.1.20.08.2.2	Belanja Barang dan Jasa	646.129.500,00	609.635.500,00	94,35
5.1.19.1.20.08.2.3	Belanja Modal	4.500.000,00	0,00	0,00
5.1.20	Oboda, Pemth Umum, Adm Keu, Perangkat Daerah, Kepegawaian, & Persandian	131.167.771.470,00	122.990.054.285,00	93,77
5.1.20.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
5.1.20.1.03.01.2	BELANJA LANGSUNG	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
5.1.20.1.03.01.2.1	Belanja Pegawai	27.800.000,00	27.800.000,00	100,00
5.1.20.1.03.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.200.000,00	22.200.000,00	100,00
5.1.20.1.20.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pos DPRD)	4.815.862.600,00	4.539.105.666,00	94,25
5.1.20.1.20.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.815.862.600,00	4.539.105.666,00	94,25
5.1.20.1.20.01.1.1	Belanja Pegawai	4.815.862.600,00	4.539.105.666,00	94,25
5.1.20.1.20.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	487.100.000,00	390.702.914,00	80,21
5.1.20.1.20.02.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	487.100.000,00	390.702.914,00	80,21
5.1.20.1.20.02.1.1	Belanja Pegawai	487.100.000,00	390.702.914,00	80,21

URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.20.1.20.03	Sekretariat Daerah	24.314.519.432,00	22.523.372.712,00	(1.791.146.720,00)	92,63
5.1.20.1.20.03.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.061.189.000,00	8.020.596.390,00	(40.592.610,00)	99,50
5.1.20.1.20.03.1.1	Belanja Pegawai	8.061.189.000,00	8.020.596.390,00	(40.592.610,00)	99,50
5.1.20.1.20.03.2	BELANJA LANGSUNG	16.253.330.432,00	14.502.776.322,00	(1.750.554.110,00)	89,23
5.1.20.1.20.03.2.1	Belanja Pegawai	2.572.825.000,00	2.467.735.000,00	(105.090.000,00)	95,92
5.1.20.1.20.03.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.278.679.932,00	11.641.940.872,00	(1.636.739.060,00)	87,67
5.1.20.1.20.03.2.3	Belanja Modal	401.825.500,00	393.100.450,00	(8.725.050,00)	97,83
5.1.20.1.20.04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	10.082.692.000,00	9.597.316.217,00	(485.375.783,00)	95,09
5.1.20.1.20.04.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.811.976.000,00	1.622.234.914,00	(189.741.086,00)	89,53
5.1.20.1.20.04.1.1	Belanja Pegawai	1.811.976.000,00	1.622.234.914,00	(189.741.086,00)	89,53
5.1.20.1.20.04.2	BELANJA LANGSUNG	8.270.716.000,00	7.965.081.303,00	(305.634.697,00)	96,30
5.1.20.1.20.04.2.1	Belanja Pegawai	581.585.000,00	553.726.600,00	(27.858.400,00)	95,21
5.1.20.1.20.04.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.508.506.000,00	7.235.503.903,00	(273.002.097,00)	96,36
5.1.20.1.20.04.2.3	Belanja Modal	180.625.000,00	175.850.800,00	(4.774.200,00)	97,36
5.1.20.1.20.05	Inspektorat Kabupaten	3.562.457.000,00	3.461.596.252,00	(100.860.748,00)	97,17
5.1.20.1.20.05.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.411.957.000,00	1.333.054.752,00	(78.902.248,00)	94,41
5.1.20.1.20.05.1.1	Belanja Pegawai	1.411.957.000,00	1.333.054.752,00	(78.902.248,00)	94,41
5.1.20.1.20.05.2	BELANJA LANGSUNG	2.150.500.000,00	2.128.541.500,00	(21.958.500,00)	98,98
5.1.20.1.20.05.2.1	Belanja Pegawai	541.175.000,00	519.925.000,00	(21.250.000,00)	96,07
5.1.20.1.20.05.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.485.602.500,00	1.485.366.500,00	(236.000,00)	99,98
5.1.20.1.20.05.2.3	Belanja Modal	123.722.500,00	123.250.000,00	(472.500,00)	99,62
5.1.20.1.20.06	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah	70.096.389.438,00	66.006.243.375,00	(4.090.146.063,00)	94,16
5.1.20.1.20.06.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	55.940.676.588,00	53.050.820.244,00	(2.879.856.344,00)	94,85
5.1.20.1.20.06.1.1	Belanja Pegawai	3.494.479.000,00	2.893.971.730,00	(600.507.270,00)	82,82
5.1.20.1.20.06.1.4	Belanja Hibah	23.836.558.850,00	23.706.488.700,00	(130.070.150,00)	99,45
5.1.20.1.20.06.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.171.723.968,00	2.271.174.800,00	(900.549.168,00)	71,61
5.1.20.1.20.06.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	581.281.900,00	530.809.806,00	(50.472.094,00)	91,32
5.1.20.1.20.06.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	23.856.632.870,00	23.506.150.208,00	(350.482.662,00)	98,53
5.1.20.1.20.06.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	152.225.000,00	(847.775.000,00)	15,22
5.1.20.1.20.06.2	BELANJA LANGSUNG	14.155.712.850,00	12.945.423.131,00	(1.210.289.719,00)	91,45
5.1.20.1.20.06.2.1	Belanja Pegawai	3.703.780.000,00	3.529.300.000,00	(174.480.000,00)	95,29
5.1.20.1.20.06.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.917.432.850,00	7.889.623.835,00	(1.027.809.015,00)	88,47
5.1.20.1.20.06.2.3	Belanja Modal	1.534.500.000,00	1.526.499.296,00	(8.000.704,00)	99,48
5.1.20.1.20.07	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat	5.877.578.000,00	5.581.199.074,00	(296.378.926,00)	94,96

KODOK URUT	URAIAN	PERUBAHAN			
5.1.20.1.20.07.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.480.122.337,00		(59.495.663,00)	96,14
	Belanja Pegawai	1.480.122.337,00		(59.495.663,00)	96,14
5.1.20.1.20.07.1.1	BELANJA LANGSUNG	4.101.076.737,00		(236.883.263,00)	94,54
	Belanja Pegawai	970.404.000,00		(50.031.000,00)	95,10
5.1.20.1.20.07.2.1	Belanja Barang dan Jasa	3.085.407.737,00		(182.105.263,00)	94,43
5.1.20.1.20.07.2.2	Belanja Modal	45.265.000,00		(4.747.000,00)	90,51
5.1.20.1.20.07.2.3					
5.1.20.1.20.08	Satuan Polisi Pamong Praja	1.952.230.891,00		(146.978.109,00)	93,00
5.1.20.1.20.08.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.377.975.491,00		(38.327.509,00)	97,29
	Belanja Pegawai	1.377.975.491,00		(38.327.509,00)	97,29
5.1.20.1.20.08.1.1	BELANJA LANGSUNG	574.255.400,00		(108.650.600,00)	84,09
	Belanja Pegawai	89.350.000,00		(19.450.000,00)	82,12
5.1.20.1.20.08.2.1	Belanja Barang dan Jasa	362.895.400,00		(88.168.600,00)	80,45
5.1.20.1.20.08.2.2	Belanja Modal	122.010.000,00		(1.032.000,00)	99,16
5.1.20.1.20.08.2.3					
5.1.20.1.20.09	Pemerintah Kecamatan Sabbung	621.280.907,00		(80.561.093,00)	88,52
5.1.20.1.20.09.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	476.017.797,00		(78.894.203,00)	85,78
	Belanja Pegawai	476.017.797,00		(78.894.203,00)	85,78
5.1.20.1.20.09.1.1	BELANJA LANGSUNG	145.263.110,00		(1.666.890,00)	98,87
	Belanja Pegawai	19.800.000,00		0,00	100,00
5.1.20.1.20.09.2.1	Belanja Barang dan Jasa	121.075.110,00		(1.666.890,00)	98,64
5.1.20.1.20.09.2.2	Belanja Modal	4.388.000,00		0,00	100,00
5.1.20.1.20.09.2.3					
5.1.20.1.20.10	Pemerintah Kecamatan Baebunta	958.999.145,00		(44.394.855,00)	95,58
5.1.20.1.20.10.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	809.273.910,00		(41.940.090,00)	95,07
	Belanja Pegawai	809.273.910,00		(41.940.090,00)	95,07
5.1.20.1.20.10.1.1	BELANJA LANGSUNG	149.725.235,00		(2.454.765,00)	98,39
	Belanja Pegawai	36.150.000,00		0,00	100,00
5.1.20.1.20.10.2.1	Belanja Barang dan Jasa	100.575.235,00		(2.454.765,00)	97,62
5.1.20.1.20.10.2.2	Belanja Modal	13.000.000,00		0,00	100,00
5.1.20.1.20.10.2.3					
5.1.20.1.20.11	Pemerintah Kecamatan Limbong	531.241.569,00		(85.091.431,00)	86,19
5.1.20.1.20.11.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	381.321.569,00		(85.091.431,00)	81,76
	Belanja Pegawai	381.321.569,00		(85.091.431,00)	81,76
5.1.20.1.20.11.1.1	BELANJA LANGSUNG	149.920.000,00		0,00	100,00
	Belanja Pegawai	13.300.000,00		0,00	100,00
5.1.20.1.20.11.2.1	Belanja Barang dan Jasa	131.190.000,00		0,00	100,00
5.1.20.1.20.11.2.2	Belanja Modal	5.430.000,00		0,00	100,00
5.1.20.1.20.11.2.3					

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.20.1.20.12	Pemerintah Kecamatan Seko	488.458.000,00	373.225.195,00	(115.232.805,00)	76,41
5.1.20.1.20.12.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	324.508.000,00	213.757.195,00	(110.750.805,00)	65,87
5.1.20.1.20.12.1.1	Belanja Pegawai	324.508.000,00	213.757.195,00	(110.750.805,00)	65,87
5.1.20.1.20.12.2	BELANJA LANGSUNG	163.950.000,00	159.468.000,00	(4.482.000,00)	97,27
5.1.20.1.20.12.2.1	Belanja Pegawai	19.200.000,00	15.350.000,00	(3.850.000,00)	79,95
5.1.20.1.20.12.2.2	Belanja Barang dan Jasa	138.500.000,00	137.868.000,00	(632.000,00)	99,54
5.1.20.1.20.12.2.3	Belanja Modal	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00
5.1.20.1.20.13	Pemerintah Kecamatan Rampi	263.570.000,00	192.688.200,00	(70.881.800,00)	73,11
5.1.20.1.20.13.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	114.600.000,00	53.400.000,00	(61.200.000,00)	46,60
5.1.20.1.20.13.1.1	Belanja Pegawai	114.600.000,00	53.400.000,00	(61.200.000,00)	46,60
5.1.20.1.20.13.2	BELANJA LANGSUNG	148.970.000,00	139.288.200,00	(9.681.800,00)	93,50
5.1.20.1.20.13.2.1	Belanja Pegawai	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00
5.1.20.1.20.13.2.2	Belanja Barang dan Jasa	137.570.000,00	127.888.200,00	(9.681.800,00)	92,96
5.1.20.1.20.14	Pemerintah Kecamatan Malangke	529.942.000,00	482.586.172,00	(47.355.828,00)	91,05
5.1.20.1.20.14.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	372.312.000,00	326.386.102,00	(45.925.898,00)	87,66
5.1.20.1.20.14.1.1	Belanja Pegawai	372.312.000,00	326.386.102,00	(45.925.898,00)	87,66
5.1.20.1.20.14.2	BELANJA LANGSUNG	157.630.000,00	156.200.070,00	(1.429.930,00)	99,09
5.1.20.1.20.14.2.1	Belanja Pegawai	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	100,00
5.1.20.1.20.14.2.2	Belanja Barang dan Jasa	118.830.000,00	117.400.070,00	(1.429.930,00)	98,80
5.1.20.1.20.14.2.3	Belanja Modal	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
5.1.20.1.20.15	Pemerintah Kecamatan Malangke Barat	598.467.000,00	547.775.722,00	(50.691.278,00)	91,53
5.1.20.1.20.15.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	415.837.000,00	365.155.722,00	(50.681.278,00)	87,81
5.1.20.1.20.15.1.1	Belanja Pegawai	415.837.000,00	365.155.722,00	(50.681.278,00)	87,81
5.1.20.1.20.15.2	BELANJA LANGSUNG	182.630.000,00	182.620.000,00	(10.000,00)	99,99
5.1.20.1.20.15.2.1	Belanja Pegawai	21.910.000,00	21.910.000,00	0,00	100,00
5.1.20.1.20.15.2.2	Belanja Barang dan Jasa	127.930.000,00	127.920.000,00	(10.000,00)	99,99
5.1.20.1.20.15.2.3	Belanja Modal	32.790.000,00	32.790.000,00	0,00	100,00
5.1.20.1.20.16	Pemerintah Kecamatan Masamba	1.898.627.000,00	1.858.909.875,00	(39.717.125,00)	97,91
5.1.20.1.20.16.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.707.206.000,00	1.676.104.257,00	(31.101.743,00)	98,18
5.1.20.1.20.16.1.1	Belanja Pegawai	1.707.206.000,00	1.676.104.257,00	(31.101.743,00)	98,18
5.1.20.1.20.16.2	BELANJA LANGSUNG	191.421.000,00	182.805.618,00	(8.615.382,00)	95,50
5.1.20.1.20.16.2.1	Belanja Pegawai	53.850.000,00	53.400.000,00	(450.000,00)	99,16
5.1.20.1.20.16.2.2	Belanja Barang dan Jasa	132.571.000,00	124.405.618,00	(8.165.382,00)	93,84
5.1.20.1.20.16.2.3	Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00

URUT	URAIAN	ANGGARAN BERTAHAP PERUBAHAN	REALISASI	(RD)	(SO)
5.1.20.1.20.17	Pemerintah Kecamatan Mappedocang	697.307.000,00	622.275.738,00	(75.031.262,00)	89,24
5.1.20.1.20.17.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	543.607.000,00	474.186.778,00	(69.420.222,00)	87,23
5.1.20.1.20.17.1.1	Belanja Pegawai	543.607.000,00	474.186.778,00	(69.420.222,00)	87,23
5.1.20.1.20.17.2	BELANJA LANGSUNG	153.700.000,00	148.088.960,00	(5.611.040,00)	96,35
5.1.20.1.20.17.2.1	Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.000.000,00	(800.000,00)	89,74
5.1.20.1.20.17.2.2	Belanja Barang dan Jasa	145.900.000,00	141.088.960,00	(4.811.040,00)	96,70
5.1.20.1.20.18	Pemerintah Kecamatan Bone-Bone	965.287.000,00	922.945.143,00	(42.341.857,00)	95,61
5.1.20.1.20.18.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	813.637.000,00	774.674.933,00	(38.962.067,00)	95,21
5.1.20.1.20.18.1.1	Belanja Pegawai	813.637.000,00	774.674.933,00	(38.962.067,00)	95,21
5.1.20.1.20.18.2	BELANJA LANGSUNG	151.650.000,00	148.270.210,00	(3.379.790,00)	97,77
5.1.20.1.20.18.2.1	Belanja Pegawai	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	100,00
5.1.20.1.20.18.2.2	Belanja Barang dan Jasa	113.850.000,00	110.470.210,00	(3.379.790,00)	97,03
5.1.20.1.20.19	Pemerintah Kecamatan Sukamaju	755.045.000,00	693.421.084,00	(61.623.916,00)	91,84
5.1.20.1.20.19.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	592.795.000,00	535.301.094,00	(57.493.906,00)	90,30
5.1.20.1.20.19.1.1	Belanja Pegawai	592.795.000,00	535.301.094,00	(57.493.906,00)	90,30
5.1.20.1.20.19.2	BELANJA LANGSUNG	162.250.000,00	158.119.990,00	(4.130.010,00)	97,45
5.1.20.1.20.19.2.1	Belanja Pegawai	29.800.000,00	28.450.000,00	(1.350.000,00)	95,47
5.1.20.1.20.19.2.2	Belanja Barang dan Jasa	132.450.000,00	129.669.990,00	(2.780.010,00)	97,90
5.1.20.1.20.20	Pemerintah Kelurahan Kappuna	185.523.000,00	170.289.859,00	(15.233.141,00)	91,79
5.1.20.1.20.20.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	55.800.000,00	43.800.000,00	(12.000.000,00)	78,49
5.1.20.1.20.20.1.1	Belanja Pegawai	55.800.000,00	43.800.000,00	(12.000.000,00)	78,49
5.1.20.1.20.20.2	BELANJA LANGSUNG	129.723.000,00	126.489.859,00	(3.233.141,00)	97,51
5.1.20.1.20.20.2.1	Belanja Pegawai	73.200.000,00	70.800.000,00	(2.400.000,00)	96,72
5.1.20.1.20.20.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56.523.000,00	55.689.859,00	(833.141,00)	98,53
5.1.20.1.20.21	Pemerintah Kelurahan Bone	180.123.000,00	160.766.690,00	(19.356.310,00)	89,25
5.1.20.1.20.21.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	53.400.000,00	41.000.000,00	(12.400.000,00)	76,78
5.1.20.1.20.21.1.1	Belanja Pegawai	53.400.000,00	41.000.000,00	(12.400.000,00)	76,78
5.1.20.1.20.21.2	BELANJA LANGSUNG	126.723.000,00	119.766.690,00	(6.956.310,00)	94,51
5.1.20.1.20.21.2.1	Belanja Pegawai	73.200.000,00	69.600.000,00	(3.600.000,00)	95,08
5.1.20.1.20.21.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53.523.000,00	50.166.690,00	(3.356.310,00)	93,73
5.1.20.1.20.22	Pemerintah Kelurahan Kasimbon	183.323.000,00	162.883.580,00	(20.439.420,00)	88,85
5.1.20.1.20.22.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	52.800.000,00	37.850.000,00	(14.950.000,00)	71,69
5.1.20.1.20.22.1.1	Belanja Pegawai	52.800.000,00	37.850.000,00	(14.950.000,00)	71,69

URUT	URATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.20.2.02.01.2.1	Belanja Pegawai	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	100,00
5.1.20.2.02.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56.300.000,00	56.245.000,00	(55.000,00)	99,90
5.1.21	Ketahanan Pangan	7.787.036.000,00	7.627.506.740,00	(159.529.260,00)	97,95
5.1.21.1.21.01	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	6.757.992.000,00	6.601.330.240,00	(156.661.760,00)	97,68
5.1.21.1.21.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.619.768.000,00	5.513.486.525,00	(106.281.475,00)	98,11
5.1.21.1.21.01.1.1	Belanja Pegawai	5.619.768.000,00	5.513.486.525,00	(106.281.475,00)	98,11
5.1.21.1.21.01.2	BELANJA LANGSUNG	1.138.224.000,00	1.087.843.715,00	(50.380.285,00)	95,57
5.1.21.1.21.01.2.1	Belanja Pegawai	204.625.000,00	202.125.000,00	(2.500.000,00)	98,78
5.1.21.1.21.01.2.1	Belanja Pegawai	702.950.600,00	660.638.415,00	(42.312.185,00)	93,98
5.1.21.1.21.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	230.648.400,00	225.080.300,00	(5.568.100,00)	97,59
5.1.21.1.21.01.2.3	Belanja Modal	1.029.044.000,00	1.026.176.500,00	(2.867.500,00)	99,72
5.1.21.2.01.01	Dinas Pertanian	1.029.044.000,00	1.026.176.500,00	(2.867.500,00)	99,72
5.1.21.2.01.01.2	BELANJA LANGSUNG	95.970.000,00	95.970.000,00	0,00	100,00
5.1.21.2.01.01.2.1	Belanja Pegawai	933.074.000,00	930.206.500,00	(2.867.500,00)	99,69
5.1.21.2.01.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.659.007.200,00	3.518.157.838,00	(140.849.362,00)	96,15
5.1.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.659.007.200,00	3.518.157.838,00	(140.849.362,00)	96,15
5.1.22.1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	1.164.323.000,00	1.107.090.938,00	(57.232.062,00)	95,08
5.1.22.1.22.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.164.323.000,00	1.107.090.938,00	(57.232.062,00)	95,08
5.1.22.1.22.01.1.1	Belanja Pegawai	2.494.684.200,00	2.411.066.900,00	(83.617.300,00)	96,65
5.1.22.1.22.01.2	BELANJA LANGSUNG	676.160.000,00	650.735.000,00	(25.425.000,00)	96,24
5.1.22.1.22.01.2.1	Belanja Pegawai	1.784.524.200,00	1.727.201.900,00	(57.322.300,00)	96,79
5.1.22.1.22.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	33.130.000,00	(870.000,00)	97,44
5.1.22.1.22.01.2.3	Belanja Modal	517.000.000,00	514.283.900,00	(2.716.100,00)	99,47
5.1.23	Statistik	517.000.000,00	514.283.900,00	(2.716.100,00)	99,47
5.1.23.1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	517.000.000,00	514.283.900,00	(2.716.100,00)	99,47
5.1.23.1.06.01.2	BELANJA LANGSUNG	81.600.000,00	81.580.000,00	(20.000,00)	99,98
5.1.23.1.06.01.2.1	Belanja Pegawai	435.400.000,00	432.703.900,00	(2.696.100,00)	99,38
5.1.23.1.06.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.999.550,00	(450,00)	100,00
5.1.24	Kearsipan	35.000.000,00	34.999.550,00	(450,00)	100,00
5.1.24.1.26.01	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	35.000.000,00	34.999.550,00	(450,00)	100,00
5.1.24.1.26.01.2	BELANJA LANGSUNG	17.780.000,00	17.780.000,00	0,00	100,00
5.1.24.1.26.01.2.1	Belanja Pegawai	17.220.000,00	17.219.550,00	(450,00)	100,00
5.1.24.1.26.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.340.286.000,00	4.245.138.903,00	(95.147.097,00)	97,81
5.1.25	Komunikasi dan Informatika	535.000.000,00	525.165.250,00	(9.834.750,00)	98,16
5.1.25.1.20.03	Sekretariat Daerah				

URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.20.1.20.22.2	BELANJA LANGSUNG	130.523.000,00	125.033.580,00	(5.489.420,00)	95,79
5.1.20.1.20.22.2.1	Belanja Pegawai	31.800.000,00	27.000.000,00	(4.800.000,00)	84,91
5.1.20.1.20.22.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98.723.000,00	98.033.580,00	(689.420,00)	99,30
5.1.20.1.20.23	Pemerintah Kelurahan Balase	177.523.000,00	169.624.705,00	(7.898.295,00)	95,55
5.1.20.1.20.23.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	54.000.000,00	46.200.000,00	(7.800.000,00)	85,56
5.1.20.1.20.23.1.1	Belanja Pegawai	54.000.000,00	46.200.000,00	(7.800.000,00)	85,56
5.1.20.1.20.23.2	BELANJA LANGSUNG	123.523.000,00	123.424.705,00	(98.295,00)	99,92
5.1.20.1.20.23.2.1	Belanja Pegawai	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	100,00
5.1.20.1.20.23.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.023.000,00	88.924.705,00	(98.295,00)	99,89
5.1.20.1.20.24	Pemerintah Kelurahan Marobo	149.600.000,00	115.850.000,00	(33.750.000,00)	77,44
5.1.20.1.20.24.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	51.600.000,00	17.850.000,00	(33.750.000,00)	34,59
5.1.20.1.20.24.1.1	Belanja Pegawai	51.600.000,00	17.850.000,00	(33.750.000,00)	34,59
5.1.20.1.20.24.2	BELANJA LANGSUNG	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	100,00
5.1.20.1.20.24.2.1	Belanja Pegawai	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	100,00
5.1.20.1.20.24.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52.400.000,00	52.400.000,00	0,00	100,00
5.1.20.1.20.25	Pemerintah Kelurahan Salassa	143.000.000,00	117.800.000,00	(25.200.000,00)	82,38
5.1.20.1.20.25.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	51.600.000,00	26.400.000,00	(25.200.000,00)	51,16
5.1.20.1.20.25.1.1	Belanja Pegawai	51.600.000,00	26.400.000,00	(25.200.000,00)	51,16
5.1.20.1.20.25.2	BELANJA LANGSUNG	91.400.000,00	91.400.000,00	0,00	100,00
5.1.20.1.20.25.2.1	Belanja Pegawai	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00
5.1.20.1.20.25.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.400.000,00	49.400.000,00	0,00	100,00
5.1.20.1.20.26	Pemerintah Kelurahan Bone-Bone	149.600.000,00	100.778.600,00	(48.821.400,00)	67,37
5.1.20.1.20.26.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	51.600.000,00	22.950.000,00	(28.650.000,00)	44,48
5.1.20.1.20.26.1.1	Belanja Pegawai	51.600.000,00	22.950.000,00	(28.650.000,00)	44,48
5.1.20.1.20.26.2	BELANJA LANGSUNG	98.000.000,00	77.828.600,00	(20.171.400,00)	79,42
5.1.20.1.20.26.2.1	Belanja Pegawai	48.600.000,00	44.900.000,00	(3.700.000,00)	92,39
5.1.20.1.20.26.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.400.000,00	32.928.600,00	(16.471.400,00)	66,66
5.1.20.2.01.01	Dinas Pertanian	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
5.1.20.2.01.01.2	BELANJA LANGSUNG	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
5.1.20.2.01.01.2.1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
5.1.20.2.01.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
5.1.20.2.02.01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	80.000.000,00	79.945.000,00	(55.000,00)	99,93
5.1.20.2.02.01.2	BELANJA LANGSUNG	80.000.000,00	79.945.000,00	(55.000,00)	99,93

NOMOR URUT	URATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5.1.25.1.20.03.2	BELANJA LANGSUNG	535.000.000,00	525.165.250,00	(9.834.750,00)	98,16
5.1.25.1.20.03.2.1	Belanja Pegawai	58.400.000,00	54.405.000,00	(3.995.000,00)	93,16
5.1.25.1.20.03.2.2	Belanja Barang dan Jasa	476.600.000,00	470.760.250,00	(5.839.750,00)	98,77
5.1.25.1.25.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata	3.805.285.000,00	3.719.973.653,00	(85.312.347,00)	97,76
5.1.25.1.25.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.213.876.000,00	1.144.773.881,00	(69.102.119,00)	94,31
5.1.25.1.25.01.1.1	Belanja Pegawai	1.213.876.000,00	1.144.773.881,00	(69.102.119,00)	94,31
5.1.25.1.25.01.2	BELANJA LANGSUNG	2.591.410.000,00	2.575.199.772,00	(16.210.228,00)	99,37
5.1.25.1.25.01.2.1	Belanja Pegawai	755.150.000,00	752.140.000,00	(3.010.000,00)	99,60
5.1.25.1.25.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.505.260.000,00	1.493.234.772,00	(12.025.228,00)	99,20
5.1.25.1.25.01.2.3	Belanja Modal	331.000.000,00	329.825.000,00	(1.175.000,00)	99,65
5.1.26	Perpustakaan	878.198.000,00	862.128.087,00	(16.069.913,00)	98,17
5.1.26.1.26.01	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	878.198.000,00	862.128.087,00	(16.069.913,00)	98,17
5.1.26.1.26.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	323.645.000,00	315.591.087,00	(8.053.913,00)	97,51
5.1.26.1.26.01.1.1	Belanja Pegawai	323.645.000,00	315.591.087,00	(8.053.913,00)	97,51
5.1.26.1.26.01.2	BELANJA LANGSUNG	554.553.000,00	546.537.000,00	(8.016.000,00)	98,55
5.1.26.1.26.01.2.1	Belanja Pegawai	100.950.000,00	95.430.000,00	(5.520.000,00)	94,53
5.1.26.1.26.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	366.700.000,00	364.602.000,00	(2.098.000,00)	99,43
5.1.26.1.26.01.2.3	Belanja Modal	86.903.000,00	86.505.000,00	(398.000,00)	99,54
5.2	Urusan Pilihan	24.867.535.540,00	21.971.756.435,93	(2.895.779.104,07)	88,36
5.2.01	Pertanian	10.950.648.900,00	9.127.447.603,36	(1.823.201.296,64)	83,35
5.2.01.1.21.01	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	1.175.325.000,00	1.126.473.540,00	(48.851.460,00)	95,84
5.2.01.1.21.01.2	BELANJA LANGSUNG	1.175.325.000,00	1.126.473.540,00	(48.851.460,00)	95,84
5.2.01.1.21.01.2.1	Belanja Pegawai	74.375.000,00	74.375.000,00	0,00	100,00
5.2.01.1.21.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.084.950.000,00	1.036.100.140,00	(48.849.860,00)	95,50
5.2.01.1.21.01.2.3	Belanja Modal	16.000.000,00	15.998.400,00	(1.600,00)	99,99
5.2.01.2.01.01	Dinas Pertanian	8.096.715.000,00	6.355.822.163,36	(1.740.892.836,64)	78,50
5.2.01.2.01.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.620.724.000,00	2.592.843.682,00	(27.880.318,00)	98,94
5.2.01.2.01.01.1.1	Belanja Pegawai	2.620.724.000,00	2.592.843.682,00	(27.880.318,00)	98,94
5.2.01.2.01.01.2	BELANJA LANGSUNG	5.475.991.000,00	3.762.978.481,36	(1.713.012.518,64)	68,72
5.2.01.2.01.01.2.1	Belanja Pegawai	448.310.000,00	436.749.000,00	(11.561.000,00)	97,42
5.2.01.2.01.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.048.016.000,00	2.483.756.829,00	(564.259.171,00)	81,49
5.2.01.2.01.01.2.3	Belanja Modal	1.979.665.000,00	842.472.652,36	(1.137.192.347,64)	42,56
5.2.01.2.02.01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	1.678.608.900,00	1.645.151.900,00	(33.457.000,00)	98,01

KODOK URUT	URUTAN PERUBAHAN	URUTAN PERUBAHAN	URUTAN PERUBAHAN
5.2.01.2.02.01.2	1.678.608.900,00	1.645.151.900,00	(33.457.000,00)
5.2.01.2.02.01.2.1	246.730.000,00	246.030.000,00	(700.000,00)
5.2.01.2.02.01.2.2	1.383.878.900,00	1.351.121.900,00	(32.757.000,00)
5.2.01.2.02.01.2.3	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
5.2.02	5.332.033.000,00	4.379.382.402,00	(952.650.598,00)
5.2.02.1.21.01	34.000.000,00	33.943.000,00	(57.000,00)
5.2.02.1.21.01.2	34.000.000,00	33.943.000,00	(57.000,00)
5.2.02.1.21.01.2.1	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00
5.2.02.1.21.01.2.2	29.850.000,00	29.793.000,00	(57.000,00)
5.2.02.2.02.01	5.298.033.000,00	4.345.439.402,00	(952.593.598,00)
5.2.02.2.02.01.1	2.934.921.000,00	2.912.374.800,00	(22.546.200,00)
5.2.02.2.02.01.1.1	2.934.921.000,00	2.912.374.800,00	(22.546.200,00)
5.2.02.2.02.01.2	2.363.112.000,00	1.433.064.602,00	(930.047.398,00)
5.2.02.2.02.01.2.1	429.420.000,00	213.470.000,00	(215.950.000,00)
5.2.02.2.02.01.2.2	1.852.692.000,00	1.138.794.602,00	(713.897.398,00)
5.2.02.2.02.01.2.3	81.000.000,00	80.800.000,00	(200.000,00)
5.2.03	3.305.976.000,00	3.276.438.828,00	(29.537.172,00)
5.2.03.2.03.01	3.305.976.000,00	3.276.438.828,00	(29.537.172,00)
5.2.03.2.03.01.1	1.170.378.000,00	1.164.474.828,00	(5.903.172,00)
5.2.03.2.03.01.1.1	1.170.378.000,00	1.164.474.828,00	(5.903.172,00)
5.2.03.2.03.01.2	2.135.598.000,00	2.111.964.000,00	(23.634.000,00)
5.2.03.2.03.01.2.1	368.200.000,00	364.914.900,00	(3.285.100,00)
5.2.03.2.03.01.2.2	1.676.598.000,00	1.656.249.100,00	(20.348.900,00)
5.2.03.2.03.01.2.3	90.800.000,00	90.800.000,00	0,00
5.2.04	250.300.000,00	240.754.000,00	(9.546.000,00)
5.2.04.1.25.01	250.300.000,00	240.754.000,00	(9.546.000,00)
5.2.04.1.25.01.2	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00
5.2.04.1.25.01.2.1	227.500.000,00	217.954.000,00	(9.546.000,00)
5.2.04.1.25.01.2.2	2.913.160.990,00	2.848.322.570,00	(64.838.420,00)
5.2.05	2.913.160.990,00	2.848.322.570,00	(64.838.420,00)
5.2.05.2.05.01	1.435.181.000,00	1.379.719.530,00	(55.461.470,00)
5.2.05.2.05.01.1	1.435.181.000,00	1.379.719.530,00	(55.461.470,00)
5.2.05.2.05.01.1.1	1.435.181.000,00	1.379.719.530,00	(55.461.470,00)

URUT		1.477.979.990,00	1.468.603.040,00	(9.376.950,00)	99,05
5.2.05.2.05.01.2	BELANJA LANGSUNG	142.850.000,00	141.500.000,00	(1.350.000,00)	99,46
5.2.05.2.05.01.2.1	Belanja Pegawai	737.983.090,00	734.012.240,00	(3.970.850,00)	99,32
5.2.05.2.05.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	597.146.900,00	593.090.800,00	(4.056.100,00)	99,22
5.2.05.2.05.01.2.3	Belanja Modal	1.601.380.750,00	1.588.928.632,57	(12.452.117,43)	99,22
5.2.06	Perdagangan	1.601.380.750,00	1.588.928.632,57	(12.452.117,43)	99,22
5.2.06.1.15.01	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1.601.380.750,00	1.588.928.632,57	(12.452.117,43)	99,22
5.2.06.1.15.01.2	BELANJA LANGSUNG	15.150.000,00	15.150.000,00	0,00	100,00
5.2.06.1.15.01.2.1	Belanja Pegawai	109.801.750,00	103.514.162,00	(6.287.588,00)	94,27
5.2.06.1.15.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.476.429.000,00	1.470.264.470,57	(6.164.529,43)	99,58
5.2.06.1.15.01.2.3	Belanja Modal	150.000.000,00	149.376.500,00	(623.500,00)	99,58
5.2.07	Perindustrian	150.000.000,00	149.376.500,00	(623.500,00)	99,58
5.2.07.1.15.01	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	150.000.000,00	149.376.500,00	(623.500,00)	99,58
5.2.07.1.15.01.2	BELANJA LANGSUNG	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	100,00
5.2.07.1.15.01.2.1	Belanja Pegawai	127.800.000,00	127.176.500,00	(623.500,00)	99,51
5.2.07.1.15.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	364.035.900,00	361.105.900,00	(2.930.000,00)	99,20
5.2.08	Transmigrasi	364.035.900,00	361.105.900,00	(2.930.000,00)	99,20
5.2.08.1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	364.035.900,00	361.105.900,00	(2.930.000,00)	99,20
5.2.08.1.13.01.2	BELANJA LANGSUNG	34.000.000,00	32.800.000,00	(1.200.000,00)	96,47
5.2.08.1.13.01.2.1	Belanja Pegawai	330.035.900,00	328.305.900,00	(1.730.000,00)	99,48
5.2.08.1.13.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa				

URUT	URUT	URUT	URUT	ANGKARAN SETERAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
6							
6.1							
6.1.20							
6.1.20.1.20.06							
6.1.20.1.20.06.1				43.414.852.767,94	43.391.557.712,94	(23.295.055,00)	99,95
6.1.20.1.20.06.1.1				43.025.349.767,94	43.025.349.767,94	0,00	100,00
6.1.20.1.20.06.1.5				389.503.000,00	74.875.070,00	(314.627.930,00)	19,22
6.1.20.1.20.06.1.6				0,00	291.332.875,00	291.332.875,00	0,00
6.1.20.1.20.06.2				1.074.025.000,00	3.591.269.354,76	2.517.244.354,76	334,37
6.1.20.1.20.06.2.2				0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.20.1.20.06.2.3				74.025.000,00	74.025.000,00	0,00	100,00
6.1.20.1.20.06.2.4				0,00	2.517.244.354,76	2.517.244.354,76	0,00
6.1.20.1.20.06.2.5				1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00

PEMBIAYAAN DAERAH:
 Urusan Wajib
 Oboda, Pemth Umum, Adm Kcu, Perangkat Daerah, Kepegawalan, & Persandian
 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman
 Penerimaan Piutang Daerah
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
 Pembayaran Pokok Utang
 Pemberian Pinjaman Daerah
 Pinjaman Dana Bergulir

